



AWAL TAHUN, PEJABAT PEMKOT DIROMBAK 13 Jabatan Kepala Dinas Masih Kosong

YOGYA (KR) - Memasuki awal tahun 2019, Walikota Yogya Haryadi Suyuti, merombak pejabat di lingkungan Pemkot Yogya. Meski demikian, masih ada 13 jabatan kepala dinas yang mengalami kekosongan dan mendesak untuk segera diisi.

Haryadi tidak menampik hal tersebut. Menurutnya, perombakan jabatan merupakan hal yang wajar dalam suatu organisasi.

"Intinya untuk mempercepat layanan kepada masyarakat. Tapi kami juga mohon maaf masih ada 13 jabatan tinggi pratama yang kosong," tandasnya di sela melantik ratusan pejabat Pemkot Yogya di kompleks Balaikota, Jumat (4/1).

Khusus untuk jabatan tinggi pratama, sebelum perombakan para kandidat menjalani serangkaian tes guna menentukan kualifikasi. Sedangkan jabatan di bawahnya atau setara kepala bidang, tidak sedikit yang menjalani promosi jabatan. Sementara 13 jabatan kepala dinas yang masih kosong tersebut di an-

taranya Dinas Pendidikan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Kebakaran.

Haryadi memastikan, 13 jabatan kepala dinas yang kosong tersebut akan segera dilakukan pengisian. Ditargetkan awal bulan depan tim panitia seleksi (pansel) sudah terbentuk guna menja-ring atau membuka lelang jabatan secara terbuka. "Jika semua lancar maka akhir Februari sudah bisa terisi semuanya. Seleksi jabatan tinggi pratama kami gelar secara terbuka dan siapa pun yang memenuhi syarat bisa mengajukan diri," tandasnya.

Terkait tahun politik yang kini se-

makin memanas, Haryadi mengingatkan jajaran aparat sipil negara untuk memahami aturan dengan baik. Menurutnya, pejabat di lingkuan Pemkot Yogya seharusnya sudah paham makna netralitas berikut sanksi yang mengintainya. "Tidak usah coba-coba deh, fokus saja dengan pekerjaan organisasi," tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Yogya Sigit Wicaksono, menyoroti perombakan pejabat yang dinilai kurang proporsional. Terutama dikosongkannya jabatan kepala dinas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Pendidikan. Menurutnya, kedua organisasi perangkat daerah tersebut saat ini tengah memiliki tugas besar yang membutuhkan kebijakan strategis dari kepala dinas. Khususnya terkait persiapan penerimaan peserta didik baru serta administrasi keuangan daerah di awal tahun. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BKPP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005